

**RANCANGAN RENJA
TAHUN ANGGARAN 2018**



DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA BANDA ACEH

**DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Rancangan Renja Tahun Anggaran 2018 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah dapat disusun dengan baik.

Rancangan Renja disusun dalam rangka mewujudkan terciptanya *good government* pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, rancangan Renja diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

Banda Aceh, Maret 2017
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Banda Aceh

RIZAL JUNAEDI, SE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19610519 199003 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan sektor strategis sebagai lokomotif penghela pembangunan perekonomian, diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar dalam menciptakan struktur perekonomian nasional dan daerah yang kokoh. Untuk mewujudkan harapan tersebut ditetapkan kebijakan-kebijakan sektor perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dengan kebijakan tersebut diharapkan peningkatan pemasukan devisa Negara, pendapatan daerah, menciptakan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, kesempatan produksi dan distribusi dan berbagai jenis barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 telah ditetapkan Struktur Organisasi Dinas dan Tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Banda Aceh. yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Tugas dan Wewenang tersebut diharapkan dapat menghadapi era globalisasi.

Dengan adanya era globalisasi tersebut Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh harus memiliki sebuah rencana kerja agar dapat menghadapi paradigma di masa yang akan datang. Rancangan Renja merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan kerja baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan Renja yang jelas dan sinergis, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rancangan Renja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka disusunlah Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Rancangan Renja Tahun Anggaran 2018 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh memuat usulan program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 16) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ;
- 17) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 19) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 20) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
- 21) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusun Rancangan Renja

Maksud Penyusunan dokumen Rancangan renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan terciptanya Good Governance pada Pemerintah kota Banda Aceh dan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan Visi, dan Misi yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Renja

Tujuan Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2016, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas atau Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran I : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan

Lampiran II : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Renja Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Koperasi, UKM dan Perdagangan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan kinerja Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2016 berdasarkan LAKIP yang sudah disusun semua menetapkan sembilan sasaran strategis, sebelas indikator kinerja, Lima Belas program, dan Tiga kegiatan

Selama tahun 2016 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melaksanakan 5 (lima) sasaran strategis, 9 (sembilan) indikator sasaran, 10 (sembilan) program, dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan selama satu tahun tersebut secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2016 pencapaian fisik sebesar 99 persen dan keuangan 97,04 persen.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2016 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
A.	Peningkatan Disiplin aparatur				
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	66 stell	62 stell	93.94%
B.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				
1.	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	100 UKM	0	0



2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
3	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%
4	Penyedia barang cetakan dan pengadaan	Pembayaran barang cetakan dan penggandaan surat-surat dinas	12 bulan	12 bulan	100%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
6	Penyediaan makanan dan minuman	Pembelian makan dan minum pegawai	11 bulan	11 bulan	100%
7	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
8	Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan barang	Pembayaran jasa pelelangan/pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	100%
9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Pemabayaran jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%
B.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%
2.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	12 bulan	100%
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%
4.	Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah perajin yang ikut pelatihan furniture	50 perajin	50 perajin	100%
5.	Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry	Jumlah perajin yang ikut pelatihan souvenir dan kue serta yang diberi bantuan peralatan	100 perajin	100 perajin	100%
6.	Promosi hasil industri	Jumlah pameran produk IKM	16 kali	16 kali	100%
7.	Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa	Jumlah pasar yang diawasi	6 pasar	50 swalayan	100%
8.	Penertiban dan pengaturan pasar	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar	6 pasar	100%
9.	Peningkatan prasarana dan sarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun	3 pasar	3 pasar	100%
10.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	3 kali	100%
11.	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Update informasi harga pasar	12 bulan	12 bulan	100%
12.	Penyediaan jasa layanan umum daerah	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar	13 pasar	100%



13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah/update data UKM di kota Banda Aceh	600 UKM	600 UKM	100%
14.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif yang akan dilakukan penilaian	46 koperasi	46 koperasi	100%
C.	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				
1.	Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa	Jumlah pasar yang diawasi	9 kecamatan 50 swalayan	9 kecamatan 50 swalayan	100%
2.	Penertiban dan pengaturan pasar	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	6 pasar	6 pasar	100%
3.	Peningkatan prasarana dan sarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar	2 pasar	100%
D.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				
1.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	3 kali	100%
2.	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Update informasi harga pasar	6 bulan	6 bulan	100%
E.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				
1.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	160 koperasi	160 koperasi	100%
F.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi				
1.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif yang akan dilakukan penilaian	16 koperasi	16 koperasi	100%
G.	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif				
1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah/update data UKM di kota Banda Aceh	600 UKM	600 UKM	100%
H.	Program peningkatan pelayanan pasar				
1.	Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar	13 pasar	100%



3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
A.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				
1.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	16 koperasi	40 koperasi	250%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, yang ditarget adalah 66 stell, realisasinya adalah 62 stell, ini disebabkan karena ada pegawai yang telah pindah dan mendapatkan pakaian dinas ditempat tugas baru.

Pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan, dengan indikator kinerja adalah jumlah yang mengikuti pelatihan, target yang ingin dicapai adalah 100 UKM, tetapi realisasi yang dapat dicapai adalah 0. Ini disebabkan karena dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan pelatihan, telah dialihkan pada 3 item pekerjaan berupa hibah barang atau jasa, yaitu :

1. Bantuan modal usaha peralatan dan perlengkapan tempat usaha sol sepatu
2. Bantuan modal usaha peralatan dan perlengkapan tempat usaha kelapa muda
3. Bantuan perlengkapan/peralatan kepada 842 UKM

b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Dari pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2016 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari 5 (lima) sasaran sebesar 97.72%. Secara umum seluruh target sasaran yang telah ditetapkan tercapai.

Dari rincian Evaluasi Kinerja Kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka pencapaian Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2016 telah tercapai.

c. Faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Pada kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dengan indikator kinerja adalah jumlah pengurus koperasi yang dilatih, target yang ingin dicapai adalah 16 koperasi, tetapi realisasi yang dapat dicapai adalah 40 koperasi. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan 4 tahapan/gelombang, dimana setiap 1 koperasi diikuti oleh 4 anggota koperasi. Banyaknya realisasi yang dapat dicapai disebabkan karena adanya permintaan masyarakat yang tetuang dalam Musrenbang dan dana yang tersedia juga dapat tercukupi.



4. Impilkasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Dari rincian Evaluasi Kinerja Kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka pencapaian pelaksanaan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2016 telah tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan seperti: sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kota Banda Aceh hampir selalu berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih rendah dan juga Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai upaya penegakan ekonomi syariah dan pengurangan praktik riba di Kota Banda Aceh sehingga perlu upaya mendorong tumbuhnya kegiatan produksi produk unggulan di setiap gampong.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh memiliki Isu-isu strategi selama rentang waktu 5 Tahun yang akan datang yaitu Tahun 2017 – 2022 antara lain:

1. Masih adanya para pedagang yang menjual barang kadaluarsa
2. Banyaknya koperasi yang tidak aktif.
3. Lemahnya UKM dalam kompetisi pasar
4. Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL
5. Belum adanya pelaksanaa kegiatan tera ulang
6. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha
7. Memfasilitasi KUR
8. Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK)
9. Masih banyaknya Usaha Simpan Pinjam koperasi belum dilaksanakan secara syariah
10. Pembahasan dan penerapan Perwal PKL
11. Melengkapi sarpras pasar
12. Pembahasan dan penerapan Perwal tentang penataan pasar dan toko/swalayan
13. Mengfungsikan pasar yang belum optimal
14. Melakukan pengawasan tentang peredaran barang dan jasa
15. Melakukan serah terima P3D dari provinsi ke kota
16. Melakukan MoU dengan kabupaten/kota
17. Membangun los pasar di Lampulo, sumur bor, talut, tower air dan mushalla



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh telah melakukan identifikasi terhadap lingkungan internal dan *eksternal* yaitu:

1) Analisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strenght)

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pemimpin
6. Tersedianya dana penunjang

b. Kelemahan (Weakness)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur dibidang perencanaan dan pengendalian
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian
5. Pejabat structural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya dukungan dari Walikota dan Wakil Walikota
2. Adanya regulasi perencanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
3. Adanya dukungan dana dari Provinsi NAD dan Departemen
4. Adanya kemajuan Iptek dibidang Industri

b. Ancaman (Threat)

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung bagi petugas pendataan
3. Adanya tuntutan perencanaan yang berkualitas
4. Adanya kekayaan potensi ekonomi daerah belum tergarap secara maksimal.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data-data dari bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai bahan Penyusunan Rancangan Renja Tahun Anggaran 2019.

Dengan adanya rancangan awal RKPD diharapkan semua program dan kegiatan dalam RKA dapat diakomodir kedalam DPA pada setiap Tahun Anggaran.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adanya sinkronisasi antara usulan program Dinas dan usulan kegiatan masyarakat, dari hasil MUSRENBANG dan MUSRENA ke dalam Kegiatan Dinas pada setiap Tahun Anggaran, namun program dan kegiatan ini akan diusulkan untuk Tahun Anggaran 2019 karena dari setiap Gampong dalam kecamatan masing-masing mengusulkan program untuk Pemberdayaan masyarakat, sehingga pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tetap mengakomodir sesuai dengan pelaporan Anggaran yang tersedia.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan gabungan dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Satker Pasar, oleh karena itu dalam membahas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi

Undang-undang No. 25/1992 tentang Koperasian

- Menyatakan untuk mendirikan Koperasi Primer minimal harus memiliki 20 orang anggota
- Modal awal yang dimiliki Koperasi Primer berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koperasi membutuhkan dukungan, terutama dalam hal perubahan dan Permodalan organisasi serta manajemen usaha
- Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan PT. Telkom tentang program pengembangan Koperasi Modren tahun 2012 sd 2014.

2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- Program koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) bertujuan memberdayakan perilaku UMKM agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya
- Pemerintah meluncurkan kredit UMKM dan koperasi di gedung BRI I jakarta, Senin 5 November 2007 program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang secara langsung upaya untuk mengurangi kemiskinan.
- Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp. 1,45 triliun untuk memberdayakan UMKM dan koperasi, termaksud untuk memberikan jaminan.
- Kredit dengan pola penjaminan adalah jalan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tentunya juga jalan yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat kita.

- Program pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2004-2009 di arahkan pada 5 program pokok, yaitu program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pemberdayaan usaha skala mikro, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- Langkah-langkah untuk mempermudah UKM mendapatkan akses permodalan saat ini, seperti yang terjadi di koperasi sedang mengembangkan lembaga keuangan mikro berjumlah 2500 yang tersebar di 2500 Kecamatan. Selain itu kementerian koperasi dan UKM aktif dalam melakukan kegiatan promosi UKM.
- Ada kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi UKM untuk memperoleh kredit dari Perbankan Nasional sebesar Rp. 10 Miliar - Rp. 20 Miliar.
- Kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah termasuk koperasi. Bank pemberi antara lain; BNI, Bank Mandiri, BRI dan BUKOPIN.

KUR memberi pinjaman sampai Rp. 5 Juta tanpa agunan melalui BRI. Untuk jaminan kredit, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp. 1,4 Triliun ke Askrindo

3. Bidang Perdagangan

Kebijakan pemerintah dalam masalah perijinan mengalami penyerpunaan melalui Permedag No.46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penertiban surat izin usaha perdagangan (SIUP).bisa di lihat beberapa pasal berikut ini:

Pertama, soal teknis mengenai SUAP diatur di Bab II. Pada pasal 2,ayat 2 dan 3 di sebutkan:

SIUP terdiri dari beberapa macam: SIUP kecil, menengah, dan besar. Dan selain tiga SIUP itu,juga dapat di berikan SIUP mikro kepadaperusahaan perdagangan mikro.

Sementara itu,pada pasal 3 di jelaskan mengenai persyaratan dari tiga SIUP itu sebagai berikut:

1. SIUP kecil wajib di miliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta s/d Rp 500 juta.
2. SIUP menengah wajib di miliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp 500 juta s/d Rp 10 milyar.
3. SIUP besar wajib di miliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10 milyar.

Di jelaskan juga bahwa kekayaan bersih yang di maksud adalah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.kemudian. pasal 8 di sebutkan bahwa menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP dan memberikan kewenangan penerbitan SIUP kepada, Gubernur DKI,seluruh bupati/walikota di luar DKI. Kemudian bupati /walikota itu melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada kepal dinas terkait. Kedua tetang masalah waktu perijinan. Hal ini di atur di pasal 12 yang menyebutkan, bahwa pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama tiga hari kerja terhitung sejak di terimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan bear.ketiga ,tentang biaya di jelaskan di pasal 16, yakni bahwa setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak di kenakan distribusi.

4. BLUD UPTD Pasar

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 39 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh Antara Lain menyatakan sebagai berikut : Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 UPTD pasar mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas yang berhubungan dengan pengelolaan pasar. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD pasar, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pasar
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar
- c. Pendataan aset di bidang pengelolaan pasar
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketalaksanaan

- e. Pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar
- f. Pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Blud UPTD Pasar sampai saat ini belum ada Kebijakan Nasional yang mengatur tentang UPTD pasar Kota Banda Aceh baru sebatas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 39 Tahun 2011.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 yang berpedoman pada Renstra 2017 – 2022 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- A. Tujuan :
 - 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi di sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan
- B. Sasaran :
 - 1. Meningkatnya pertumbuhan UMKM
 - 2. Meningkatnya pembiayaan keuangan berbasis syariah
 - 3. Meningkatnya koperasi aktif
 - 4. Mengoptimalkan fungsi pasar

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 akan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik.
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - c. Menyediakan alat tulis kantor.
 - d. Menyediakan barang cetakan dan pengadaan.
 - e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan makanan dan minuman.

- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - h. Penyedia Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang.
 - i. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional
 5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
 6. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah
 - a. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 8. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan.
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - b. Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah

- c. Penertiban dan Pengaturan Pasar
 - d. Peningkatan prasarana dan sarana pasar
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
 - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
10. Program peningkatan pelayanan pasar
- a. Penyediaan jasa layanan umum daerah (BLUD)

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Renja merupakan Dokumen perencanaan teknis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Penyusunan dokumen Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 disusun dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Maret 2017
Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan Kota Banda Aceh

RIZAL JUNAEDI, SE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19610519 199003 1 007

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2017
Kota Banda Aceh**

SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (tahun lalu/ n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran									
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian alat tulis kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
Kegiatan Penyediaan Cetak dan Pengadaan	Pembayaran barang cetakan dan pengadaan	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum	Pembelian makan dan minum pegawai	55 bulan	11Bulan	11Bulan	11Bulan	100	11 Bulan	11 Bulan	100	

Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah UKM yang akan mendapatkan bantuan pengembangan UKM di Kota Banda Aceh	500 UMKM	100 UMKM	-	-	-	83 UKM	81 UKM	97	
Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah/ update data UKM di Kota Banda Aceh	3170 UKM	2000 UKM	600 UKM	600 UKM	100	-	-	-	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas SDM bagi UKM									
Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	400 UKM	65 UMKM	100 UKM	0	0	60 UKM	50 UKM	83	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas SDM bagi Koperasi									
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	207 koperasi	11 koperasi	16 koperasi	40 koperasi	250	160 koperasi	160 koperasi	100	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersedianya Koperasi berprestasi dan kesehatan KSP/USP									
Pembinaan , Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	266 koperasi	40 koperasi	46 koperasi	46 koperasi	100	46 koperasi	46 koperasi	100	
Program Peningkatan Pelayanan Pasar	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar									
Penyediaan Jasa Layanan Umum Daerah	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	13 pasar	13 pasar	13 pasar	13 pasar	100	13 pasar	13 pasar	100	

Banda Aceh, Maret 2017
Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Banda Aceh

Rizal Junaedi, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19610519 199003 1 007

Tabel 2.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Banda Aceh

SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif		Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	20%	10,401,170,050	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif		Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	20%	10,401,170,050	
	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	300 UM	10,362,066,050	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	300 UM	10,362,066,050	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Usaha Mikro yang dimonev	1000 UM	23,356,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Usaha Mikro yang dimonev	1000 UM	23,356,000	
	Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional		Jumlah koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang dibina melalui pola syariah dan konvensional	30 koperasi	15,748,000	Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional		Jumlah koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang dibina melalui pola syariah dan konvensional	30 koperasi	15,748,000	
	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan Kompetitif	20%	72,385,440	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan Kompetitif	20%	72,385,440	
	Pelatihan kewirausahaan		Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang kewirausahaan	60 UM	28,630,700	Pelatihan kewirausahaan		Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang kewirausahaan	60 UM	28,630,700	
	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD		Jumlah koperasi yang memahami pengelolaan manajemen	80 koperasi	43,754,740	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD		Jumlah koperasi yang memahami pengelolaan manajemen	80 koperasi	43,754,740	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	20%	120,000,000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	20%	120,000,000	
	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah jenis produk usaha mikro yang dipromosikan	8 produk	120,000,000	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah jenis produk usaha mikro yang dipromosikan	8 produk	120,000,000	
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20%	59,601,268	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20%	59,601,268	
	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		Jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	60 koperasi	46,344,004	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		Jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	60 koperasi	46,344,004	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah koperasi yang dimonev	200 koperasi	13,257,264	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah koperasi yang dimonev	200 koperasi	13,257,264	

	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase jumlah pasar, toko/swalayan yang diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	20%	4,589,340,950	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase jumlah pasar, toko/swalayan yang diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	20%	4,589,340,950
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Jumlah toko/swalayan yang diawasi	55 toko / swalayan	58,091,250	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Jumlah toko/swalayan yang diawasi	55 toko / swalayan	58,091,250
	Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah		Jumlah pasar yang di laksanakan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapan lainnya)	1 pasar	9,923,700	Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah		Jumlah pasar yang di laksanakan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapan lainnya)	1 pasar	9,923,700
	Penertiban dan Pengaturan Pasar		Jumlah pelaksanaan operasi pasar	8 pasar	76,180,000	Penertiban dan Pengaturan Pasar		Jumlah pelaksanaan operasi pasar	8 pasar	76,180,000
	Peningkatan Prasarana dan sarana pasar		jumlah pasar yang dibangun dan direhab	2 pasar yg di rehab	4,445,146,000	Peningkatan Prasarana dan sarana pasar		jumlah pasar yang dibangun dan direhab	2 pasar yg di rehab	4,445,146,000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat	20%	533,198,300	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat	20%	533,198,300
	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk		Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	515,375,000	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk		Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	515,375,000
	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah komoditi yang diinformasikan	37 jenis	17,823,300	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah komoditi yang diinformasikan	37 jenis	17,823,300
	Pemantauan ketersediaan bahan pokok		Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, mireng, tepung)	0	0	Pemantauan ketersediaan bahan pokok		Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, mireng, tepung)	0	0
	Program Peningkatan Pelayanan Pasar		Persentase Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	20%	5,375,253,073	Program Peningkatan Pelayanan Pasar		Persentase Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	20%	5,375,253,073
	Penyediaan jasa layanan umum daerah		Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	11 pasar	5,375,253,073	Penyediaan jasa layanan umum daerah		Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	11 pasar	5,375,253,073
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	538,123,200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	538,123,200
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	79,326,000	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	79,326,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	42,400,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	42,400,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	16 jenis	15,180,320	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	16 jenis	15,180,320
	Penyediaan Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	15,219,380	Penyediaan Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	15,219,380

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 jenis	2,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 jenis	2,100,000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum		Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	8470 porsi	112,897,500	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum		Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	8470 porsi	112,897,500
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	19 laporan	190,000,000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	19 laporan	190,000,000
	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang		Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bulan	6,600,000	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang		Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bulan	6,600,000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	12 bulan	74,400,000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	12 bulan	74,400,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	143,282,800	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	143,282,800
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	4 jenis	35,500,000	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	4 jenis	35,500,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	4 kali	36,500,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	4 kali	36,500,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	84 kali	63,128,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	84 kali	63,128,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	24 kali	8,154,800	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	24 kali	8,154,800
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	31,350,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	31,350,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	64 stel	31,350,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	64 stel	31,350,000

Tabel 2.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Banda Aceh

SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	12
A	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif		Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	20%	
	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	300 UM	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Usaha Mikro yang dimonev	1000 UM	
	Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional		Jumlah koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang dibina melalui pola syariah dan konvensional	30 koperasi	
	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan Kompetitif	20%	
	Pelatihan kewirausahaan		Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang kewirausahaan	60 UM	
	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD		Jumlah koperasi yang memahami pengelolaan manajemen	80 koperasi	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	20%	
	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah jenis produk usaha mikro yang dipromosikan	8 produk	
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20%	
	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		Jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	60 koperasi	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah koperasi yang dimonev	200 koperasi	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase jumlah pasar, toko/swalayan yang diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	20%	
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Jumlah toko/swalayan yang diawasi	55 toko / swalayan	
	Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian daerah		Jumlah pasar yang di laksanakan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapan lainnya)	1 pasar	
	Penertiban dan Pengaturan Pasar		Jumlah pelaksanaan operasi pasar	8 pasar	
	Peningkatan Prasarana dan sarana pasar		jumlah pasar yang dibangun dan direhab	2 pasar yg di rehab	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat	20%	
	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk		Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	
	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah komoditi yang diinformasikan	37 jenis	
Pemantauan ketersediaan bahan pokok		Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, mirenge, tepung)	0		
Program Peningkatan Pelayanan Pasar		Persentase Meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	20%		
Penyediaan jasa layanan umum daerah		Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	11 pasar		

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	16 jenis	
	Penyediaan Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum		Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	8470 porsi	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	19 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang		Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bulan	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran		Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	12 bulan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	4 jenis	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	4 kali	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	84 kali	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	24 kali	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	64 stel	

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2018
dan Prakiran Maju Tahun 2019 Kota Banda Aceh

Lembar..... Dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan BIDANG KOPERASI & UKM								
1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif		20%	10,401,170,050			20%	7,282,822,800
1.15.01.15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah kebijakan tentang Usaha Mikro		0	-			0	-
1.15.01.15.02	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang pembiayaan syariah		0	-			650 UM	379,874,837
1.15.01.15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah keuangan mikro aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		0	-	APBK			
1.15.01.15.08	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha		300 UM	10,362,066,050	APBK		350 UM	6,862,314,663
1.15.01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Usaha Mikro yang dimonev		1000 UM	23,356,000	APBK		650 UM	24,633,300
1.15.01.15.12	Pembinaan Koperasi Simpan Pinajm dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam yang dibina melalui pola syariah dan konvensional		30 koperasi	15,748,000	APBK		30 koperasi	16,000,000

1.15.01.16	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan Kompetitif		20%	72,385,440			20%	231,873,984
1.15.01.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi untuk peningkatan kemitraan		0	-	APBK		50 UM	35,000,000
1.15.01.16.06	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang kewirausahaan		60 UM	28,630,700	APBK		80 UM	96,873,984
1.15.01.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah koperasi yang memahami pengelolaan manajemen	Kota Banda Aceh	80 koperasi	43,754,740	APBK		80 koperasi	100,000,000
1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	Kota Banda Aceh	20%	12,000,000	APBK		20%	132,000,000
1.15.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk Usaha Mikro yang dipromosikan	Kota Banda Aceh	8 produk	12,000,000	APBK		10 produk	132,000,000
1.15.01.18	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		20%	59,601,268			20%	71,061,395
1.15.01.18.05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		60 koperasi	46,344,004	APBK		60 koperasi	46,500,874
1.15.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dimonev	Kota Banda Aceh	200 koperasi	13,257,264	APBK		200 koperasi	24,560,521
TOTAL PADA BIDANG KOPERASI & UKM					10,545,156,758				7,717,758,179

	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan BIDANG PERDAGANGAN								
1.15.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase jumlah pasar, toko/swalayan yang diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	Kota Banda Aceh	20%	4,531,249,700			20%	6,391,049,900
1.15.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah toko/swalayan yang diawasi		55 toko/swalayan	58,091,250				
1.15.01.15.05	Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Jumlah pasar yang di laksanakan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapan lainnya)		1 pasar	9,923,700	APBK		3 pasar	32,070,000
1.15.01.15.06	Penertiban dan Pengaturan Pasar	Jumlah pelaksanaan operasi pasar		8 pasar	76,180,000			6 pasar	32,070,000
	Peningkatan Prasarana dan sarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun dan direhab		2 pasar yg di rehab	4,445,146,000	APBK		3 pasar yg di rehab	6,326,909,900
1.15.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat	Kota Banda Aceh	20%	533,198,300			20%	436,418,130
1.15.01.18.03	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan pasar rakyat		3 kali	515,375,000	APBK		3 kali	300,000,000
1.15.01.18.06	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah komoditi yang diinformasikan		37 jenis	17,823,300	APBK		37 jenis	50,000,000
	Pemantauan ketersediaan bahan pokok	Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, mireng, tepung)		0	0	APBK		5 jenis	86,418,130

	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		0	46,732,875			25%	46,732,875
1.15.01.18.08	Pemantauan harga eceran LPG bersubsidi	Jumlah Pemantauan ketersediaan LPG bersubsidi pada setiap pangkalan yang telah ditentukan		-	46,732,875	APBK		20 pangkalan	46,732,875
1.15.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Persentase tertatanya Pedagang Kaki Lima dan asongan	Kota Banda Aceh	0	0	APBK		25%	100,000,000
1.15.01.19.01	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah data Pedagang Kaki Lima dan yang akurat		0	0	APBK		2 kecamatan	50,000,000
1.15.01.19.03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Perwal/Qanun penataan pedagang kaki lima dan asongan		0	0			1 Perwal/qanun	50,000,000
TOTAL PADA BIDANG PERDAGANGAN					5,111,180,875				6,974,200,905
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan UPTD Pasar								
1.15.01.20	Program Peningkatan Pelayanan Pasar	Persentase meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	Kota Banda Aceh	20%	5,375,253,073			11 pasar	5,644,015,727
1.15.01.20.01	Penyediaan jasa layanan umum daerah	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	Kota Banda Aceh	11 pasar	5,375,253,073	APBK		11 pasar	5,644,015,727
TOTAL PADA UPTD PASAR					5,375,253,073				5,644,015,727

	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan BIDANG SEKRETARIAT								
1.15.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh	100%	538,123,200			100%	599,059,720
1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Banda Aceh	12 bulan	79,326,000	APBK		12 bulan	95,000,000
1.15.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh	12 bulan	42,400,000	APBK		12 bulan	45,000,000
1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh	16 jenis	15,180,320	APBK		16 jenis	20,000,000
1.15.01.01.11	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh	5 jenis	15,219,380	APBK		5 jenis	18,000,000
1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh	40 jenis	2,100,000	APBK		40 jenis	5,500,000
1.15.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Kota Banda Aceh	8470 porsi	112,897,500	APBK		8954 porsi	113,000,000
1.15.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	19 laporan	190,000,000	APBK		20 laporan	215,059,720
1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	Kota Banda Aceh	6 bulan	6,600,000	APBK		6 bulan	7,500,000

1.15.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan		12 bulan	74,400,000	APBK		12 bulan	80,000,000
1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	143,282,800			100%	172,111,080
1.15.01.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		4 jenis	35,500,000	APBK		6 jenis	98,918,080
1.15.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	4 kali	36,500,000	APBK		0	-
1.15.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	84 kali	63,128,000	APBK		84 kali	64,000,000
1.15.01.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	24 kali	8,154,800	APBK		28 kali	9,193,000
1.15.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Kota Banda Aceh	100%	31,350,000			100%	76,320,000
1.15.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan		64 stell	31,350,000	APBK		65 stell	45,000,000
1.15.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Kota Banda Aceh	0	-	APBK		20 stell	15,000,000
1.15.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang disediakan	Kota Banda Aceh	0	-	APBK		65 stell	16,320,000
TOTAL PADA BIDANG SEKRETARIAT					712,756,000				847,490,800

Banda Aceh, Maret 2017
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh

RIZAL JUNAEDI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19610519 199003 1 007